

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/ Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: BPK Jawa Tengah

Ini Pentingnya Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Akuntabel Menurut BPK Jateng

<http://jateng.tribunnews.com/2019/03/28/ini-pentingnya-pengelolaan-dana-desa-secara-transparan-dan-akuntabel-menurut-bpk-jateng>

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali saat menjadi narasumber dalam sosialisasi bertajuk 'Peran, Tugas, dan Fungsi BPK serta DPR dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa' di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis (28/3/2019).

Ayub mengatakan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan.

Selain itu, laporannya harus dilakukan secara akuntabel.

Selain BPK Provinsi Jateng hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi yang dimoderatori Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Kudus Agus Budi Satrio.

Sosialisasi tentang dana desa tersebut diikuti para camat, kepala desa (kades), dan perangkat desa di Kabupaten Kudus.

Hadir pula Forkopinda Kabupaten Kudus dan Kepala Subauditorat Jateng I BPK Perwakilan Provinsi Jateng Bagus Kurniawan.

Selanjutnya, kata Ayub Amali, dia meminta para kades mematuhi peraturan-peraturan terkait dana desa.

Dia juga menekankan pentingnya penyampaian dokumen dan laporan secara lengkap.

"Kalau sampai penggunaan dana desa dari desa di Kabupaten Kudus ini tidak ada bukti-bukti dan laporan yang disampaikan kepada pemerintah. Sangat mungkin opini laporan keuangan kabupaten juga akan turun," kata Ayub.

Sementara, Agus Budi Satrio menyampaikan perlunya peran BPK dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Hal itu, untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaannya.

"Kami membutuhkan pengarahannya untuk menggunakan dana desa yang benar dengan bantuan BPK," katanya. (Rifqi Gozali)